MEDIA PEMBELAJARAN BKL
SERI 1

BkkbN

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SELATAN

DIPERBANYAK OLEH :
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014

PERPUSTAKAAN
MAN 1 OKU SELATAN
KABUPATEN OKU SELATAN

BkkbN

PERPUSTAKAAN
MAN 1 OKU SELATAN
NO. 13309
TGL. 19-9-2022
KELAS 363.9
ASAL PR RT HD

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
JAKARTA, 2013

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa salah satu pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pengendalian jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 berjumlah 237,6 juta jiwa. Jumlah yang besar ini terdiri dari lapisan penduduk balita, anak, dewasa, dan lansia. Khusus lansia, menurut Pendataan Keluarga tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ternyata jumlah penduduk lansia di Indonesia berjumlah 15,5 juta jiwa. Jumlah ini semakin tahun akan semakin besar. Hal ini karena adanya pembangunan kesehatan dan sosial ekonomi yang diselenggarakan di Indonesia.

Jumlah penduduk lansia yang besar ini membutuhkan penanganan yang serius, sebab mau tidak mau penduduk lansia akan menjadi salah satu lapisan penduduk yang jika tidak diberdayakan dengan maksimal akan menjadi lapisan penduduk yang dianggap beban pembangunan. Agar penduduk lansia tidak menjadi beban pembangunan diperlukan adanya pemberdayaan penduduk lansia. Hal ini sesuai dengan undang-undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk lansia di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu penduduk lansia potensial dan penduduk lansia tidak potensial.

BKKBN yang merupakan instansi pemerintah yang berwenang menyelenggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3). Khusus untuk keluarga lansia, BKKBN melalui Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan membina dan memberdayakan kelompok-kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ada di seluruh kelurahan dan desa yang ada di Indonesia.

Kelompok kegiatan BKL merupakan wadah kegiatan bagi keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan, dan pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lansia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lansia.

Tujuan utama adanya kelompok BKL adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, kelompok BKL menjadi sangat penting dan strategis keberadannya.

Agar pengelolaan dan penyelenggaraan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia semakin optimal, maka diperlukan Pedoman Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia.

Buku Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia merupakan Buku untuk penyelenggaraan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia. Dengan adanya buku ini, yang terdiri dari 10 (sepuluh) seri yaitu 1. Program Kependudukan dan KB Nasional ; 2. Pembinaan Kesehatan Fisik Bagi Lansia; 3. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Bagi Lansia; 4. Pembinaan Mental Emosional Bagi Lansia; 5. Pembinaan Mental Spiritual Bagi Lansia; 6. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Bagi Lansia; 7. Pengembangan Ekonomi Produktif Bagi Lansia; 8. Teknik Fasilitasi; 9. Teknik Dinamika Kelompok; dan 10. Teknik Advokasi dan KIE. Diharapkan penyelenggaraan Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia di setiap tingkatan wilayah dapat bergairah dan berjalan dengan baik.

Semoga Buku Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia yang terdiri dari 10 (sepuluh) seri ini dapat menjadi acuan dan pegangan bagi para pengelola dan pembina pelaksana program Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia. Dengan demikian, akan terwujud penduduk Lansia yang sehat, sejahtera, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Mei 2012
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga,

Dr. Sudibyo Alimoeso, M.A.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Seri Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dapat diselesesaikan.

Ketahanan Keluarga Lansia yang dilembagakan melalui wadah kelompok kegiatan (poktan) yang bernama Bina Keluarga Lansia (BKL). Kelompok BKL diharapkan dapat meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (PSP) keluarga lansia dan lansia itu sendiri. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia adalah bagian integral dari Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3).

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, diperlukan adanya kumpulan Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok BKL dan mengakselerasi tujuan pembinaan ketahanan keluarga lansia, yaitu peningkatan PSP keluarga lansia dan lansia itu sendiri yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dapat digunakan juga dalam kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengelola BKL. Selain itu kami harapkan seri media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia terdiri dari 10 (sepuluh) seri, dan pada seri pertama akan dibahas mengenai Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Apabila Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia yang kami susun memiliki banyak kekurangan kami mohon maaf, dan kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang senantiasa membantu kami menyelesaikan Media Pembelajaran Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia, kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Jakarta, Mei 2011
Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
Direktur,

Drs. Furqan la Faried,MA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Sasaran 2

Tujuan 2

Batasan Pengertian 2

BAB II PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL 8

Pertumbuhan Penduduk 8

Kondisi Kependudukan di Indonesia 8

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 10

Visi, Misi, dan Tujuan 11

Sasaran Strategis 12

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 13

Kegiatan Strategis 14

Arti Penting Program KKB Bagi Pembangunan Nasional 14

BAB III PENUTUP 16

DAFTAR PUSTAKA 17

LAMPIRAN 18

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam peridoe waktu tertentu, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.

Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat. Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.

B. SASARAN

Sasaran dari pemakai buku ini adalah:

1. Petugas yang akan melakukan pembinaan terhadap kader Bina Keluarga Lansia.
2. Kader BKL yang akan menyampaikan penyuluhan kepada sasaran keluarga yang memiliki lansia dan lansianya sendiri.
3. Masyarakat luas lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia.

C. TUJUAN

1. Umum

Memberikan pengetahuan/wawasan tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Khusus

Memberikan pengetahuan/wawasan tentang pertumbuhan penduduk, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

D. BATASAN PENGERTIAN

1. ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)

Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun). Angka beban tanggungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara, apakah tergolong negara maju atau bukan.

2. **ANGKA KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR)**
   Banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur tertentu pada satu periode per 1000 penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode yang sama.

3. **ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR)**
   Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur.

4. **ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR)**
   Persentase pasangan usia subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB.

5. **ANGKA REPRODUKSI NETO (NET REPRODUCTION RATE/ NRR)**
   Angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. Asumsi yang dipakai adalah bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas dan pola mortalitas ibunya.

6. **BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)**
   Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugasnya untuk melaksanakan, mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. BKKBN mempunyai fungsi:
   a) Perumusan kebijakan nasional;
   b) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
   c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
   d) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
   e) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi;
   f) Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan;
   g) Keluarga berencana.

7. **BONUS DEMOGRAFI**
   Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang.

8. **HAK-HAK REPRODUKSI**

Hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, berapa jumlah anak dan jarak anak yang dilahirkan serta memilih upaya untuk mewujudkan hak-hak tersebut (pemakaian kontrasepsi).

9. **HUMAN DEVELOPMENT INDEX (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA/IPM)**

Suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang mencakup tiga aspek utama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, yaitu:

a) Aspek pendidikan ditunjukkan dengan tingkat melek huruf dan rata-rata lama pendidikan.
b) Aspek kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian ibu waktu lahir, dan angka kematian ibu waktu melahirkan, serta
c. Aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran untuk konsumsi per tahun.

10. **INFORMED CONSENT**

Persetujuan yang diberikan oleh klien KB dan pasangannya atas dasar informasi dan penjelasan petugas pelayanan KB mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap klien tersebut.

11. **JARAK KELAHIRAN**

Jarak waktu periode antara dua kelahiran hidup yang berurutan dari seorang wanita.

12. **KADER**

Adalah orang dewasa, baik pria maupun wanita yang dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan di masyarakat sekitarnya. Kelebihan itu dapat berupa keberhasilan dalam kegiatan, keluwesan dalam hubungan kemanusiaan, status sosial ekonomi dan lain sebagainya.

13. **KELUARGA**

Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Secara implisit dalam batasan ini adalah anak yang belum menikah.

14. **KELUARGA BERENCANA (KB)**

Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

15. KELUARGA BERKUALITAS

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

16. KEMISKINAN

Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

17. KEPENDUDUKAN

Hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

18. KESEHATAN REPRODUKSI

Suatu keadaan fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan reproduksi seperti antenatal, persalinan, nifas dan kesehatan remaja.

19. KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

20. KLINIK KB

Tempat pelayanan kontrasepsi yang bersifat statis bagi ;

a) Pasangan usia subur.
b) Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah termasuk TNI-Polri maupun Swasta dan telah berpartisipasi aktif memberikan pelayanan kontrasepsi.

21. KONTRASEPSI

Obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan). Jenis kontrasepsi ada dua macam, yaitu kontrasepsi yang mengandung hormonal (pil, suntik dan implant) dan kontrasepsi non-hormonal (IUD, Kondom).

21. KUALITAS PENDUDUK

Adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.

23. **KUANTITAS PENDUDUK**
Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

24. **MOBILITAS PENDUDUK**
Adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah/wilayah (negara, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dst) dalam periode waktu tertentu.

25. **PASANGAN USIA SUBUR (PUS)**
Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun, dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.

26. **PELEDAKAN PENDUDUK**
Keadaan di mana jumlah penduduk telah melebihi kapasitas penyangganya.

27. **PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS)**
Adalah penduduk yang kecepatan perubahan jumlahnya bersifat konstan dan proporsi untuk masing-masing kelompok umurnya relatif tetap.

28. **PENGATURAN KEHAMILAN**
Upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki anak, dan mengatur jarak kelahiran yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

29. **PENYEBARAN PENDUDUK**
Upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

30. **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**
Segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.

31. **PERTUMBUHAN PENDUDUK**
Keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian terjadi pada semua golongan

umur. Sementara itu migrasi juga berperan "imigran" (pendatang) akan menambah dan "emigran" akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), in-migration (migrasi masuk), dan out-migration (migrasi keluar).

32. SENSUS PENDUDUK

Adalah sebagai keseluruhan proses pencacahan, pengumpulan dan penyusunan serta penerbitan data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk. Sensus Penduduk ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dengan tujuan untuk mengetahui jumlah komposisi dan karakteristik penduduk lainnya, yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

33. SURVEY DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA (SDKI)

Survey yang bertujuan untuk menyediakan informasi secara rinci bagi para pembuat kebijakan dan pengelola program tentang fertilitas, keikutsertaan ber-KB, kematian anak-anak dan dewasa, serta kesehatan ibu dan anak. Sejak tahun 2002-2003 survey ini juga memuat informasi tentang pengetahuan dan sikap masyarakat tentang HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Survey ini dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

34. TENAGA KERJA

Adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan tenaga kepada mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Penduduk yang berada pada usia kerja dan biasanya berusia 15 - 64 tahun.

35. UNMET NEED

Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak (definisi standar); dan/atau mereka yang "unmet need" karena risiko kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan tambahan anak (membatasi kelahiran).

BAB II

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL

A. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk memegang peranan penting dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kemajuan atau bahkan kemunduran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sangatlah penting, beberapa pakar mengemukakan pendapatnya antara lain:

1. Thomas Robert Malthus : Penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan produksi pangan meningkat seperti deret hitung, jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang;
2. Jared Diamond : Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi *"ecological suicide" (ecocide)*, yaitu bunuh diri dengan cara merusak lingkungan;
3. Nina Fedoroff : Jumlah manusia di planet bumi sebenarnya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kita harus dengan sungguh-sungguh berupaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk lebih banyak lagi. Perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan;
4. John Beddington : Karena perubahan iklim dan ledakan penduduk, menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan, air, dan energi yang luar biasa yang memicu kerusuhan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah yang paling terkena dampak.

B. KONDISI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Gambaran kondisi kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Penduduk
   a) Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (Population Reference Bureau 2011, USAID)
   b) Jumlah penduduk Indonesia menurut Sensus Penduduk tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa. Penduduk bertambah sekitar 32,5 juta jiwa selama 10 tahun terakhir (Sensus Penduduk 2010, BPS)

2. Kualitas Penduduk

a) Tingkat pendidikan masih rendah, prosentase penduduk 5 tahun ke atas berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 40,93 persen (Sensus Penduduk BPS, 2010);

b) Indeks Pembangungan Manusia menempati peringkat ke-124 dari 187 Negara, dan urutan ke-6 dari 10 Negara ASEAN (Human Development Report 2011, UNDP);

c) Angka kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,3% dari total penduduk Indonesia (Data Sosial Ekonomi BPS, 2010);

d) Angka pengangguran mencapai sebanyak 8,32 juta orang (Data Sosial Ekonomi BPS, 2010)

3. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah:

a) Sumatera : 21,3 % Penduduk (luas wilayah 25,2 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

b) Jawa : 57,5 % Penduduk (luas wilayah 6,8 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

c) Kalimantan : 5,8 % Penduduk (luas wilayah 28,5 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

d) Sulawesi : 7,3 % Penduduk (luas wilayah 9,9 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

e) Maluku : 1,1 % (luas wilayah 4,1 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

f. Papua : 1,5 % (luas wilayah 21,8 % dari luas seluruh wilayah Indonesia)

PENYEBARAN PENDUDUK INDONESIA

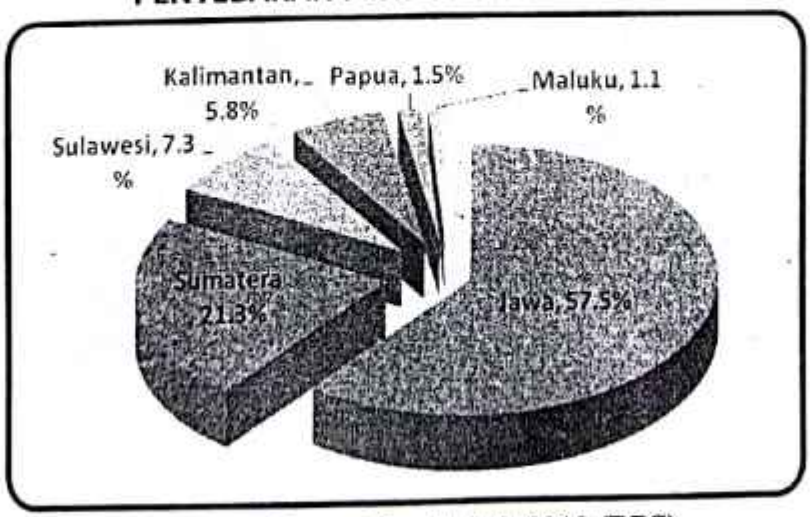

Sumber : Sensus Penduduk 2010 (BPS)

C. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Program KB Nasional di Indonesia dimulai sejak tahun tanggal 17 Oktober 1968. Dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968, dibentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus sebagai lembaga semi pemerintah. Fungsi LKBN pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu melembagakan keluarga berencana dan mengelola segala jenis bantuan.

Pada tanggal 29 Juni 1970, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 tentang pembentukan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang disingkat BKKBN. Pembentukan lembaga formal KB ini ditandai dengan dilantiknya Dewan Pembimbing KB Nasional dan Pimpinan BKKBN. Saat itu pemerintah menyatakan bahwa Porgram KB adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Tanggal 29 juni juga ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang kini dikenal dengan Hari Keluarga.

Dinamika perjalanan Program KB berlanjut seiring perjalanan pemerintahan dan sejak tahun 1992 telah dipayungi dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Perjalanan Program KB terus mengalami pasang surut, pada era tahun 1980 – 1990 Program KB mengalami masa keemasan, hal ini ditandai dengan diakuinya Indonesia oleh dunia internasional dalam hal pengendalian populasi.

Pascareformasi sempat muncul wacana pembubaran BKKBN karena program KB dianggap sebagai warisan Orde Baru, pada saat reformasi hampir semua pihak mencoba meninggalkan segala sesuatu yang terkait dengan Orde Baru. Namun demikian setelah disadari bahwa Program KB berperan sangat penting bagi pembangunan nasional, maka BKKBN tetap dipertahankan. Pada tahun 2004 kewenangan BKKBN tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi diserahkan kepada pemerintah daerah (desentralistik) sebagai salah satu bentuk otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 telah direvisi atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan pada tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah diperluas menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperkokoh arah dan tujuan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana untuk mendukung pembangunan nasional yang berwawasan kependudukan dan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Secara tersurat dalam Undang-Undang 52/2009, Perkembangan Kependudukan tercantum dalam BAB VI mengenai Perkembangan Kependudukan yang terdiri dari pasal 17 sampai dengan 46 terbagi menjadi lima bagian yaitu ; bagian kesatu tentang Perkembangan Kependudukan, bagian kedua tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, bagian ketiga tentang Penurunan Angka Kematian, bagian keempat tentang Mobilitas Penduduk, bagian kelima tentang Pengembangan Kualitas Penduduk dan Penduduk Rentan, dan bagian keenam tentang Perencanaan Kependudukan.

Adapun pada BAB VII mengenai Pembangunan Keluarga yang terdiri dari pasal 47 dan 48 mengatur tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Untuk mendukung Perkembangan Kependudukan dan Pembangungan Keluarga, maka pada BAB VIII yang terdiri dari pasal 49 sampai dengan 52 diatur tentang Data dan Informasi Kependudukan yang mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengelola data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

D. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi

   Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015

   Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertiiitas (*Total Fertilty Rate*/TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR) = 1.

2. Misi

   Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

   Misi tersebut dilakukan melalui penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi, pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

3. Tujuan

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.

b. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

E. SASARAN STRATEGIS :

Untuk mencapai penurunan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 %, Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* cara modern dari 57,4 % (SDKI 2007) menjadi 65 %;
2. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani *(unmet need)* dari 9,1 % (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 % dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS);
3. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 % (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun;
4. Menurunnya *Age Specific Rate (ASFR)* 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan;
5. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 % (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 %;
6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 % menjadi sekitar 5 %;
7. Meningkatnya kesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 % menjadi 82 %, dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 %;
8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Remaja dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.
9. Menurunnya disparitas TFR, CPR, dan *unmet need* antarwilayah sosial dan antarsosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi);

10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya;
11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota;
12. Meningkatnya jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (*informed consent)* dari 29 % menjadi sekitar 80 %.

F. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang ditandai dengan NRR=1, maka arah kebijakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga fokus prioritas, yaitu :

1. Revitalisasi Program KB yang dilaksanakan dengan strategi :
   a. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk yang responsif gender;
   b. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
   c. Promosi dan penggerakan masyarakat;
   d. Peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;
   e. Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program Kependudukan dan KB;
   f. Peningkatan kualitas manajemen program.

2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan strategi:
   a. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk;
   b. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;
   c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

3. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data Informasi memadai, akurat, dan tepat waktu yang dilaksanakan dengan strategi :
   a. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan;
   b. Penyediaan hasil kajian kependudukan;
   c. Peningkatan cakupan registrasi vital.

G. KEGIATAN STRATEGIS

Adapun kegiatan strategis untuk mendukung arah kebijakan dan strategi nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk
   a. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
   b. Perencanaan Kependudukan
   c. Pendidikan Kependudukan
   d. Analisis Dampak kependudukan

2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
   a. Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah
   b. Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur Swasta
   c. Pembinaan Kesertaan ber-KB Jalur wilayah dan sasaran Khusus
   d. Pembinaan Kesehatan Reproduksi

3. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
   a. Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Anak
   b. Pembinaan Ketahanan Remaja
   c. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia & Rentan
   d. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

H. ARTI PENTING PROGRAM KKB BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Apabila Program KKB melemah maka dipastikan akan timbul situasi dan kondisi sebagai berikut:
   a. Bencana alam;
   b. Kelaparan;
   c. Pengangguran;
   d. Kemiskinan;
   e. Dekadensi/Kemunduran Sosial;
   f. Konflik Sosial.

2. Apabila Program KKB diperkuat maka akan menciptakan fenomena menguntungkan yang biasa disebut sebagai "Bonus Demografi", yaitu ; Suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan oleh karena jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sangat besar jumlahnya, proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil, sedangkan proporsi yang berusia lanjut belum begitu

besar, sehingga mengakibatkan angka beban ketergantungan *(dependency ratio)* rendah.

3. Bonus demografi terkait dengan munculnya suatu kesempatan, yaitu *the window of opportunity* (jendela peluang) yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, beberapa hal penting mengenai jendela peluang di Indonesia adalah sebagai berikut :
   a. Terjadi tahun 2020-2030 di mana beban ketergantugan mencapai titik terendah;
   b. Proporsi penduduk akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia;
   c. Hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk.

4. Bonus Demografi dapat dijadikan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional karena menciptakan situasi dan kondisi sebagai berikut :
   a. Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif;
   b. Peranan perempuan: jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan;
   c. Tabungan masyarakat yang besar dan diinvestasikan secara produktif.

BAB III

PENUTUP

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Pertumbuhan penduduk memegang peranan penting dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kemajuan atau bahkan kemunduran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup dimensi kuantitas, kualitas, dan mobilitas pada saat ini masih tertinggal dari negara-negara lain yang mengakibatkan kualitas hidup masyarakatnya masih rendah.

Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melaksanakan fungsi mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana sebagai pengejawantahan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia. Visi BKKBN adalah Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015, dengan misi Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Apabila Program KKB diperkuat maka akan menciptakan fenomena menguntungkan yang biasa disebut sebagai "Bonus Demografi", yaitu ; Suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan oleh karena jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sangat besar jumlahnya, proporsi penduduk usia muda sudah semakin kecil, sedangkan proporsi yang berusia lanjut belum begitu besar, sehingga mengakibatkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio)* rendah. Bonus demografi terkait dengan munculnya suatu kesempatan, yaitu *the window of opportunity* (jendela peluang) yang dapat dijadikan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dan dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Jendela peluang di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020-2030 di mana beban ketergantugan mencapai titik terendah dan hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

BKKBN (2010). *Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010 – 2014*. Jakarta : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN (2011). *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BPS (2010). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 7 Desember 2010*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

UNDPD (2011) *Human Development Report 2011*. New York : United Nations Development Programme

Population Reference Bureau (2011) *World Population Data Sheet*. Washington DC : USAID

Tautan :
www.bkkbn.go.id
www.bps.go.id

Lampiran 1 :

Pertemuan ke - 1

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional

Langkah – langkah Penyuluhan untuk Kader BKL

A. Pembukaan (Wajib)

1. Pemeriksaan Kesehatan;
2. Senam bersama/Olah raga bersama;
3. Curahan hati (Curhat) membahas tentang masalah lansia yang dihadapi selama ini.

B. Materi Penyuluhan

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional

C. Waktu Penyuluhan

60 Menit atau sesuai kesepakatan.

GARIS BESAR POKOK PENYULUHAN

NO.	MATERI PENYULUHAN	KEGIATAN LANSIA	PERAN KELUARGA
1.	BAB I PENDAHULUAN	Mendengarkan dan memahami tentang konsep Pembangunan Kependudukan dan KB, Sasaran, Tujuan, dan Batasan Pengertian	Mendiskusikan dengan lansia tentang konsep Pembangunan Kependudukan dan KB, Sasaran, Tujuan, dan Batasan Pengertian
2.	BAB II PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL	Mendengarkan dan memahami tentang konsep : 1. Pertumbuhan penduduk 2. Kondisi kependudukan di Indonesia 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 4. Visi, misi, dan tujuan 5. Sasaran strategis 6. Arah kebijakan dan strategi nasional 7. Kegiatan strategis 8. Arti penting program KKB bagi pembangunan nasional	Mendiskusikan dengan Lansia tentang konsep : 1. Pertumbuhan penduduk 2. Kondisi kependudukan di indonesia 3. Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) 4. Visi, misi, dan tujuan 5. Sasaran strategis 6. Arah kebijakan dan strategi nasional 7. Kegiatan strategis 8. Arti penting program KKB bagi pembangunan nasional

3.	BAB III PENUTUP	Mendengarkan dan memahami tentang kesimpulan Pembangungan Kependudukan dan KB Nasional	Mendiskusikan dengan lansia tentang kesimpulan Pembangungan Kependu-dukan dan KB Nasional

D. PENUTUP

1. Demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu hasil pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa pertemuan berikutnya harus hadir lagi;
2. Jangan lupa materi yang diberikan hari ini, harus dipelajari lagi di rumah dan diskusikan bersama anggota keluarga;
3. Mari pertemuan kita akhiri dengan berdoa.

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
MAN 1 OKU SELATAN
KABUPATEN OKU SELATAN